

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria tercapainya kelancaran tujuan suatu organisasi atau lembaga adalah dengan mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Pada dasarnya kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. Dengan kinerja bisa dilihat hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, baik secara kualitas maupun kuantitas.

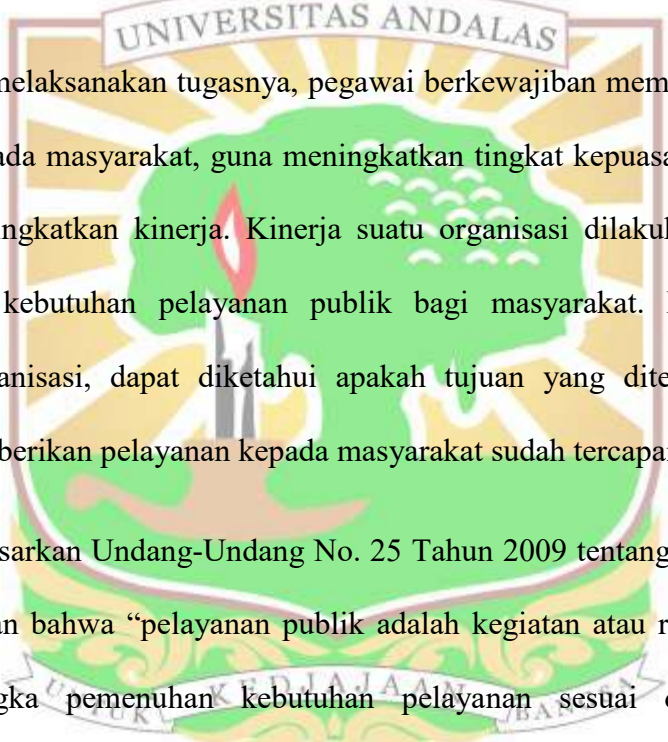
Menurut Mohammad Mahsun (2006:25)¹, kinerja adalah deskripsi seberapa baik suatu kegiatan, program, atau kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi sebagaimana diuraikan dalam perencanaan strategisnya. Sedangkan menurut Mangkunegara (2001)², kinerja adalah pekerjaan berkualitas yang dihasilkan seorang pegawai saat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Jadi, kinerja bisa dikatakan sebagai hasil kerja yang merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pegawai dapat melakukan kerja sama dengan organisasi lainnya dengan maksud dapat mencapai tujuan organisasi serta

¹ M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

² Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

meningkatkan kinerja. Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi atau lembaga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan agar dapat dinilai dan dievaluasi kinerjanya.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow background with radiating lines. Below the tree, there is a white figure that appears to be a person or a stylized animal. At the bottom of the shield, another banner contains the motto "KEMAJUAN MELALUI KEBERSEKUTUAN".

Saat melaksanakan tugasnya, pegawai berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, guna meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dan upaya meningkatkan kinerja. Kinerja suatu organisasi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Melalui penilaian kinerja organisasi, dapat diketahui apakah tujuan yang ditetapkan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah tercapai atau belum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama dari organisasi yang tidak bisa dihindari. Pegawai dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan, pegawai diminta disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Selain dituntut memberikan pelayanan terbaik dan disiplin untuk meningkatkan kinerja, pegawai perlu memaksimalkan kinerja

dengan kemajuan teknologi agar lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pejabat pemerintah daerah yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, serta perlindungan masyarakat. Sementara itu, pemadam kebakaran merupakan orang atau tim yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan operasi penyelamatan dan menanggulangi bencana.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di kepulauan Mentawai. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran bertugas untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, memberikan

bantuan pada kecelakaan, dan melakukan penyelamatan bencana. Kedua instansi ini memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sama yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya oleh seluruh anggota organisasi berdasarkan Peraturan Daerah. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal jika kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai tinggi. Karena semakin tinggi kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka akan semakin baik pula dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Banyak hal yang mempengaruhi kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain beban kerja dan fasilitas kerja. Dengan adanya beban kerja dan fasilitas kerja yang akan menentukan kinerja, maka nantinya dapat dilihat bagaimana kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beban kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Menurut Cohen (Nur Afrirahmiati, 2007:19), beban kerja merupakan kondisi pekerjaan yang dirasakan

oleh pekerja yang berkaitan dengan faktor situasional yang terdiri dari faktor lingkungan fisik dan psikis³. Beban kerja merupakan sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu. Apabila pegawai mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja bagi pegawai tersebut. Begitupun sebaliknya, jika pegawai tidak berhasil atau gagal maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja bagi pegawai yang bersangkutan.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai beban kerja yang cukup berat dikarenakan kecamatan ataupun desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjarak cukup jauh dan sulit dijangkau jika hanya menggunakan jalur perjalanan darat, dan jika menggunakan jalur perjalanan laut akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Beban kerja ini semakin terasa berat dikarenakan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana yang ada kurang memadai. Untuk memaksimalkan kinerja, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diharapkan dapat bekerja sama dan menjalin hubungan dengan pihak luar seperti Kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), serta masyarakat yang dapat membantu beban kerja dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Pemadam Kebakaran. Karena dengan beban kerja yang cukup berat itu akan membuat

³ Sentot Iskandar, Gredi Granada Sembada. *Pengaruh Beban Kerja, Motivasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bank BJB Cabang Padalarang*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship, Vol. 6, No. 1, April 2012, ISSN 2443-0633.

kinerja dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi menurun.

Karena beban kerja yang cukup berat, ada faktor lain yang dapat membantu atau meringankan beban kerja tersebut dan meningkatkan kinerja, yaitu fasilitas kerja. Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang terdapat dalam organisasi yang dapat ditempati, digunakan, dan dinikmati oleh pegawai, baik hubungan yang langsung berkaitan dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan sehingga pegawai merasa terbantu dan senang dengan adanya fasilitas kerja yang telah disediakan untuk mereka para pegawainya. Maka dengan adanya fasilitas kerja, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan merasa terbantu beban kerjanya dikarenakan adanya fasilitas yang memadai yang mereka butuhkan dan telah disediakan oleh kantor tempat mereka bekerja.

Selain fasilitas kerja yang dapat meringankan beban kerja, kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat dari beberapa variabel, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas mencakup efisiensi dan efektivitas yang mana output yang dihasilkan diharapkan lebih besar dari masukan yang digunakan, serta pelaksanaan tugas sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat selesai tepat waktu. Dimana yang kita ketahui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai lingkup pekerjaan yang berbeda, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja bekerja di bidang pengamanan dan Pemadam Kebakaran bekerja di bidang penyelamatan. Dengan digabungkannya dua instansi yang sebelumnya terpisah ini, maka mereka harus

bisa melakukan tindakan yang efektif dan efisien saat menyelesaikan pekerjaan, karena pekerjaan keduanya memerlukan waktu penanganan yang cepat mengingatkan lingkup pekerjaan pada bidang pengamanan dan penyelamatan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam bidang pengamanan perlu mengetahui cara yang efektif saat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan. Seperti jika terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat adanya kegaduhan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, maka hukuman apa yang pantas diberikan, karena hukuman yang diberikan tidak bisa disamaratakan dengan hukuman yang lain. Berbeda dengan pengaduan jika ada yang berbuat asusila, maka hukuman apa yang pantas nantinya bisa memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

Sedangkan Pemadam Kebakaran yang berperan dalam bidang penyelamatan perlu mengetahui langkah apa yang akan diambil saat melakukan penyelamatan, dengan langkah yang efektif dan efisien bisa membantu dalam hal penyelamatan agar cepat untuk ditangani, misalnya jika terjadi kebakaran, karena tidak semua kondisi di lapangan sama, jadi harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan tempat terjadinya kebakaran. Lain hal jika terdapat laporan seperti hewan masuk rumah, tindakan apa yang harus dilakukan karena tidak boleh salah langkah yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri dan juga yang lainnya.

Selanjutnya kualitas layanan, kepuasan masyarakat menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan kualitas layanan apakah sudah memberikan pelayanan yang maksimal serta puas dengan pelayanan yang diberikan. Karena kepuasan

masyarakat bisa dilihat bagaimana kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai nantinya. Seperti yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan sejumlah lapak di pinggir jalan Tuapejat dalam upaya memberikan kepuasan masyarakat dari hal kenyamanan dan ketertiban, sebagaimana dikutip dari covesia.com:

“Dalam rangka menegakkan Perda No. 3 Tahun 2017 terkait ketentraman dan ketertiban umum, kita menertibkan lapak-lapak di pinggir jalan seperti lapak ikan, ayam, dan jualan lainnya. Kita menghimbau bagi masyarakat yang berjualan ikan agar berjualan di tempat pelelangan ikan (TPI) yang sudah tersedia, apapun kendalanya tetap dihadapi dan berjualan di TPI. Kita menghimbau masyarakat sadar dan saling menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan (K3) untuk kita bersama. Selain itu, kita menertibkan anak-anak sekolah yang keluyuran di jam sekolah. Kemudian bagi pihak penyelenggara sekolah, kalau bisa guru-guru juga mengingatkan para siswa agar belajar pada jam sekolah dan tidak bolos⁴.”

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan penertiban ini awalnya sudah melakukan tahapan persuasif, yang mana membujuk atau berbicara terlebih dahulu kepada pedagang agar berjualan pada tempat yang sudah disediakan. Hal ini dilakukan agar terciptanya kondisi sekitar yang tentram, serta tidak mengganggu aktivitas umum, karena terkadang pedagang berjualan mengambil sedikit akses jalan umum yang membuat jalan semakin sempit, apalagi jalan sangat pas untuk dilalui dua mobil berpapasan.

⁴ <https://covesia.com/archipelago/86072/satpol-pp-mentawai-tertibkan-sejumlah-lapak-di-pinggir-jalan-tuapejat/>

Berikutnya responsivitas, berupa tindakan serta komunikasi yang dilakukan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Mereka harus menjalin komunikasi yang baik dan lancar agar saat melaksanakan pekerjaan tidak terjadi miskomunikasi dan dapat melakukan tindakan dengan tepat. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga menggunakan media sosial seperti *WhatsApp Grup (WAG)* dikarenakan adanya beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran yang bertugas di kecamatan dan desa yang beda pulau dengan kabupaten.

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bertugas di kecamatan yang jauh dari kabupaten harus *update* dengan info terbaru mengenai pekerjaannya, jika tidak mereka akan ketinggalan informasi. Setiap minggu pun pegawai yang bertugas di kecamatan harus melaporkan absensi agar dapat dipantau oleh Kepala Satuan. Ada beberapa pegawai yang dipanggil ke kantor dikarenakan absen selama beberapa hari, mereka menganggap absensi tersebut tidak akan dipantau. Pegawai yang bertugas di kecamatan yang beda kabupaten pun masih kesulitan dalam mendapatkan informasi dikarenakan tidak adanya alat komunikasi yang mendukung, seperti *smartphone* untuk mengakses WA. Sinyal pun menjadi salah satu tantangan untuk mendapatkan informasi, karena tidak semua wilayah dapat mengakses sinyal untuk paket data, hanya bisa melakukan panggilan via pulsa. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan sinyal atau tidak adanya paket data ini bisa dengan pergi ke kantor desa atau puskesmas untuk mengakses wifi.

Berikutnya akuntabilitas, berupa tanggungjawab. Tanggungjawab yang dapat dilakukan pegawai adalah menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan membuat laporan, karena dengan ini menjadi bukti bahwa pegawai bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaannya. Seperti halnya patroli, setiap pegawai mempunyai tim dan jadwal yang berbeda saat melakukan patroli, jika diantara mereka ada yang berhalangan tidak bisa hadir saat kegiatan patroli maka bisa digantikan oleh personil lainnya sebagai bentuk tanggungjawab atas pekerjaannya dan bentuk kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan jika antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dan juga kerjasama sebagai bentuk tanggungjawab saat melaksanakan tugas.

Dari adanya beban kerja yang didukung oleh fasilitas kerja dan diukur dari indikator kinerja, maka kinerja dapat dilihat dari hasil kerja yang telah pegawai lakukan selama pelaksanaan beban kerja yang didukung oleh fasilitas kerja yang telah tersedia di instansi terkait. Setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah membuat pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai, Maya mengatakan bahwa:

“Kinerjanya baik, karena saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat langsung ditanggapi dengan cepat, prosedur saat membuat pengaduan pun tidak berbelit-belit dan dipermudah. Akan tetapi, sangat disayangkan karena sarana yang ada kurang memadai. Misalnya jika ada kendaraan yang rusak dan apabila terdapat laporan lainnya tidak bisa dilakukan sekaligus oleh personil yang lain karena tidak adanya kendaraan yang lain.” (Hasil wawancara dengan masyarakat yang membuat pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai).

Berikut tabel kepegawaian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30
2	Pegawai Honorer (PH)	151
	Jumlah	181

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berikut kondisi fasilitas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Sarana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai

No.	Sarana	Jumlah Saat Ini (Unit)	Kondisi Sarana
1	Mobil Damkar	3	Baik
2	Mobil Dalmas	1	Kurang Baik
3	Mobil Patroli	1	Kurang Baik
4	Mobil Dinas	2	Rusak Berat
5	Motor	12	3 Baik dan 9 Rusak Berat
6	Komputer	9	2 Baik dan 7 Rusak Berat
7	Printer	8	1 Baik dan 7 Rusak Berat

8	Microphone (Toa dan Radio)	4	Baik
---	----------------------------	---	------

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai

Fenomena kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditinjau dari aspek pegawai dan sarana tentu saja sangat berpengaruh pada ketersediaan anggaran, sehingga kondisi tugas yang pada prinsipnya penegak Perda sangat terbatas. Pada penanganan bencana kebakaran yang mana dibutuhkan alat pelindung diri serta kelengkapan sarana mengakibatkan tidak maksimalnya penanganan bencana tersebut.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa:

“Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu baik. Alasannya saat membuat laporan ataupun rekap tentang kepegawaian cukup komunikatif untuk bertanya tentang hal yang kurang di mengerti, ini dilakukan agar saat membuat laporan atau rekap kepegawaian tidak salah. Namun masih ada beberapa pegawai yang tidak mau bertanya dan belum mengerti walaupun sudah dijelaskan. Saran saya untuk kedepannya agar pegawai tersebut lebih komunikatif dan mau mempelajari hal yang dirasa belum diketahuinya.”
(Hasil wawancara dengan Reda Wati Saogo, S.SiT., sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Berikut tabel perkembangan kejadian kebakaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 4 tahun terakhir (2020-2023):

Tabel 1.3
Perkembangan Kejadian Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No.	Tahun	Jumlah Kebakaran (Kejadian)
1	2020	7 Kasus
2	2021	5 Kasus
3	2022	16 Kasus
4	2023	4 Kasus

Sumber: Data Bidang Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan jumlah kasus kebakaran dari tahun ke tahun, namun waktu penanganan yang dilakukan tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa terdapat ketidakefektifan dalam kinerja Pemadam Kebakaran, baik dari segi alat pemadam kebakaran maupun pegawainya, juga kondisi geografis.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang “Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yaitu dapat mengetahui Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik didalamnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa lainnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasannya, dan mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan kualitas kinerja instansinya.